

Judul : Wacana penambahan jumlah anggota KPU kembali muncul
Tanggal : Kamis, 02 April 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Wacana Penambahan Jumlah Anggota KPU Kembali Muncul

Wacana penambahan jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali mencuat dalam diskusi publik menjelang tahapan pemilu berikutnya.

Usulan ini dinilai sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan efektivitas kerja penyelenggara pemilu, di tengah kompleksitas proses demokrasi yang semakin tinggi.

Sejumlah pihak menilai bahwa beban kerja KPU saat ini semakin berat, terutama dengan adanya pemilu serentak yang menggabungkan pemilihan legislatif dan eksekutif dalam satu waktu. Kompleksitas teknis, logistik, hingga pengelolaan data pemilu menjadi alasan utama munculnya wacana tersebut.

Beberapa pihak juga berpendapat, penambahan anggota KPU berpotensi memperkuat kapasitas kelembagaan, terutama dalam hal

pengambilan keputusan yang lebih cepat dan pembagian tugas yang lebih proporsional. Selain itu, dengan jumlah anggota yang lebih banyak, diharapkan pengawasan internal juga bisa berjalan lebih optimal.

Namun, tidak semua pihak sepakat dengan usulan ini. Beberapa kalangan menilai bahwa persoalan utama bukan pada jumlah anggota. Melainkan pada sistem kerja, koordinasi, dan kualitas sumber daya manusia di dalam KPU itu sendiri.

Menurut mereka, reformasi internal dan peningkatan profesionalitas justru lebih mendesak dibanding sekadar menambah jumlah komisioner.

Pegiat kepemiluan sekaligus dosen Hukum Pemilu di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Angraini mengatakan, penambahan jumlah komisioner KPU dan Bawaslu tidak boleh diambil semata-mata sebagai jalan pintas politik atau kompromi

jangka pendek.

"Perubahan terhadap desain kelembagaan penyelenggara pemilu harus didasarkan pada ukuran yang objektif dan terukur. Seperti beban kerja, kompleksitas tahapan pemilu, cakupan wilayah, efektivitas pengambilan keputusan, serta kebutuhan pengawasan yang riil," katanya.

Lebih jauh, Titi menilai, persoalan utama dalam penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu bukan terletak pada jumlah anggota, melainkan kualitas dan desain institusinya.

"Menurut saya, jumlah bukan persoalan yang paling penting. Menambah anggota belum tentu otomatis membuat kelembagaan menjadi lebih baik. Yang penting adalah bagaimana proses rekrutmentnya, bagaimana integritas dan kapasitas personal para anggota, bagaimana desain kelembagaannya,

serta bagaimana akuntabilitasnya dibangun," jelasnya.

Dari sisi anggaran, wacana ini juga memunculkan kekhawatiran. Penambahan anggota tentu akan berdampak pada peningkatan biaya operasional, termasuk gaji, fasilitas, dan dukungan administratif lainnya. Di tengah upaya efisiensi anggaran negara, hal ini menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah dan legislatif.

Sementara itu, pihak Pemerintah dan DPR belum memberikan keputusan final terkait usulan tersebut. Diskusi masih terus berlangsung dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan praktisi kepemiluan.

Ke depan, keputusan terkait penambahan anggota KPU diharapkan tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis,

tetapi juga prinsip independensi, efisiensi, dan integritas penyelenggaraan pemilu. Wacana ini pun diprediksi akan terus menjadi perdebatan hangat seiring mendekatnya agenda politik nasional berikutnya.

Mantan Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay mengusulkan tidak perlu ada penambahan jumlah anggota. Lebih baik peran kesekretariatan KPU yang ditambah.

Lalu, bagaimana respons Komisi II terkait wacana ini? Wakil Ketua Komisi II DPR, Zulfikar Arse Sadikin juga menganggap jumlah yang ada saat ini sudah memadai. Dia pun menapik isu penambahan untuk bagi-bagi peran.

Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pandangan Zulfikar Arse Sadikin dan Hadar Nafis Gumay terkait isu penambahan jumlah anggota KPU, berikut pertikaian wawancaranya.

HADAR NAFIS GUMAY, Mantan Komisioner KPU
Kalau Ditambah, Bikin Anggaran Membengkak

ZULFIKAR ARSE SADIKIN, Wakil Ketua Komisi II DPR
Silakan Saja Jika Itu Sebuah Wacana



Ada wacana penambahan jumlah anggota KPU dari 7 menjadi 9 orang. Apa tanggapan Anda?
Saya sudah mendengar isu tersebut. Kalanya penambahan ini agar seluruh fraksi di DPR bisa terakomodasi. Alasan resminya mungkin untuk efisiensi dan memperkuat kinerja, tetapi kesannya lebih kepada pembagian jatah.

Menurut Anda, apakah penambahan anggota KPU akan meningkatkan kinerja?
Tidak. Justru itu berpotensi kontra produktif. Seharusnya KPU semakin efisien dengan jumlah yang ada, bukan diperbanyak.

Bukankah semakin banyak anggota bisa memperkuat kerja tim?
Tidak selalu. Semakin banyak orang, koordinasi justru makin sulit. Birokrasi bisa menjadi lebih berbelit. Apalagi jika ada unsur tipikal politik, itu berpotensi merusak kualitas demokrasi.

Bagaimana dengan perbandingan di negara lain?
Di banyak negara dengan demokrasi yang baik, jumlah anggota lembaga penyelenggara pemilu tidak besar. Kualitas tidak ditemukan oleh jumlah komisioner, tetapi oleh profesionalisme dan independensi.

Apakah ada dampak lain jika jumlah anggota ditambah?
Ya, akan menambah beban anggaran negara. Setiap komisioner membutuhkan fasilitas seperti kendaraan, rumah dinas, staf, dan lain-lain.

Jadi menurut Anda, penambahan anggota KPU tidak diperlukan?
Tidak perlu.

Lalu apa solusi jika beban kerja KPU meningkat?
Lebih baik memperkuat sekretariat KPU. Staf sekretariat sudah terlatih dan bisa ditambah sesuai kebutuhan, termasuk merekrut tenaga ad hoc atau bekerja sama dengan institusi lain.

Kesimpulannya?
Penambahan jumlah anggota KPU adalah langkah mundur. Itu bukan solusi. Justru berpotensi merusak efektivitas dan kualitas penyelenggaraan pemilu. ■ RDN



Proses seleksi harus lebih objektif dan profesional. Tim seleksi harus berintegritas, dan prosesnya bebas dari campur tangan pihak tertentu. Semua harus murni berdasarkan seleksi.

Apa tanggapan Anda tentang wacana penambahan jumlah anggota KPU menjadi 9 orang?
Jumlah anggota KPU yang ada saat ini yaitu 7 orang, sudah memadai dan teruji.

Apa maksudnya sudah teruji?
Kita sudah beberapa kali menyelenggarakan pemilu dengan jumlah 7 anggota dan tidak ada masalah. Bahkan sebelumnya pernah ada 11 anggota, lalu menjadi 7 dan 5, dan penyelenggaraan pemilu tetap berjalan baik.

Namun wacana penambahan anggota KPU cukup kuat. Bagaimana Anda melihatnya?
Silakan saja jika itu sebatas wacana. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita menubuhkan perubahan Undang-Undang Pemilu jika memang ingin melakukan perubahan.

Apakah ada yang perlu diperhatikan dalam wacana perubahan Undang-Undang Pemilu?
Perubahan Undang-Undang Pemilu harus didasarkan pada tujuan yang jelas. Tanpa itu, wacana akan menjadi liar dan tidak fokus. Kita harus tahu arah dan tujuan dari perubahan tersebut.

Seperti apa arah yang seharusnya dituju?
Tujuannya adalah agar pemilu ke depan semakin baik dan terkon-solidasi. Kita harus menepati tujuan bersama terlebih dahulu, baru menentukan solusi-solusinya.

Ada isu bahwa penambahan anggota KPU agar semua fraksi mendapat

jatah. Tanggapan Anda?
Itu bukan soal bagi-bagi. Tidak ada konsep seperti itu. Yang penting sekarang adalah memastikan kapan pembalasan dilakukan dan apa tujuan yang ingin dicapai. Bukan sekadar bangor pasang, tetapi peraturan yang lebih baik.

Apakah harapan Anda ke depan terkait KPU?
Yang utama adalah memastikan KPU tetap sesuai fitrahnya: mandiri dan berifat nasional.

Bagaimana cara mewujudkan hal tersebut?
Proses seleksi harus lebih objektif dan profesional. Tim seleksi harus berintegritas, dan prosesnya bebas dari campur tangan pihak tertentu. Semua harus murni berdasarkan seleksi. ■ RDN